

Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global

Seprianus L. Padakari¹, Rezeki Putra Gulo²

Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura

Received: 11-10-2024

Revised: 15-12-2025

Accepted: 31-01-2025

Abstract

This article outlines the central role of the Church in addressing social injustice occurring globally. These inequalities span economic, social, and political dimensions, where the distribution of resources and opportunities is uneven, resulting in the marginalization of many individuals. Christian theology views justice as an essential principle grounded in God's love for all humanity. Consequently, the Church is called to fulfill its prophetic role by advocating for justice for the oppressed and striving for a more equitable social system. Theological thoughts from figures such as Gustavo Gutiérrez, who developed liberation theology, emphasize that the Church must actively engage in combating structural injustice. Additionally, Reinhold Niebuhr and John Stott highlight the Church's moral responsibility to contribute to social change through tangible actions and advocacy for fair policies. Thus, the Church is not only a spiritual institution but also an agent of social transformation, committed to realizing justice amidst global inequalities.

Keywords: Christian Theology; Social Justice; Global Inequality; Church

Abstrak

Artikel ini menguraikan peran sentral Gereja dalam menanggapi ketidakadilan sosial yang terjadi secara global. Ketimpangan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik, di mana distribusi sumber daya dan kesempatan tidak merata, menyebabkan marginalisasi bagi banyak individu. Teologi Kristen memandang keadilan sebagai prinsip esensial yang didasarkan pada kasih Allah terhadap semua manusia. Dari itu, Gereja dipanggil untuk menjalankan peran profetisnya dengan mengadvokasi keadilan bagi kaum tertindas dan memperjuangkan sistem sosial yang lebih adil. Pemikiran teologis dari tokoh-tokoh seperti Gustavo Gutiérrez, yang mengembangkan teologi pembebasan, menekankan bahwa Gereja harus terlibat aktif dalam memerangi ketidakadilan struktural. Selain itu, Reinhold Niebuhr dan John Stott menggarisbawahi tanggung jawab moral Gereja untuk berkontribusi pada perubahan sosial melalui aksi nyata dan advokasi kebijakan yang adil. Dengan demikian, Gereja bukan hanya lembaga spiritual, tetapi juga agen transformasi sosial yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan di tengah ketimpangan global.

Kata Kunci: Teologi Kristen; Keadilan sosial; Ketimpangan global; Gereja.

(*) Corresponding Author: rezekiputra05@gmail.com

How to Cite: Padakari Seprianus L. & Gulo Rezeki Putra(2025). Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global : Jurnal Tumou Tou, Vol.12. No 1 (2025): 41-51

INTRODUCTION

Teologi Kristen, sepanjang sejarahnya, selalu menjadi fondasi etis dan spiritual yang kuat dalam membentuk cara berpikir dan bertindak umat Kristen terhadap dunia. Dalam konteks global saat ini, peran teologi tidak lagi terbatas pada ruang-ruang privat atau spiritual, melainkan merambah ke wilayah sosial yang lebih luas. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah ketimpangan global, yaitu

perbedaan mencolok dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan hidup layak antara negara kaya dan negara miskin, serta di antara kelompok masyarakat di dalam sebuah negara. Gereja, sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai Alkitabiah tentang keadilan dan kasih, diharapkan berperan signifikan dalam merespons masalah ini melalui teologi yang relevan dengan keadilan sosial. Ketimpangan global bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah teologis. Gustavo Gutiérrez, seorang teolog pembebasan, menekankan bahwa ketidakadilan struktural dan kemiskinan ekstrem adalah dosa yang berakar dalam sistem sosial yang tidak adil (Dimitriadis, 2019). Menurutnya, teologi yang tidak memperhatikan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum miskin telah gagal memenuhi panggilan moralnya. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya memadukan refleksi teologis dengan tindakan sosial untuk mengatasi ketidakadilan yang terus berlanjut di dunia ini. Dengan kata lain, teologi yang relevan dengan keadilan sosial harus mampu menggerakkan Gereja untuk bertindak sebagai agen perubahan.

Dalam konteks ketimpangan global, peran Gereja menjadi semakin penting. John Stott, seorang teolog dan pemimpin gereja terkemuka, berpendapat bahwa misi Kristen tidak hanya terbatas pada penginjilan atau pelayanan rohani, tetapi juga melibatkan panggilan untuk memperjuangkan keadilan sosial (Meynell, 2022). Menurutnya, Gereja dipanggil untuk membela mereka yang lemah, memperbaiki sistem yang tidak adil, dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak-hak mereka sebagai ciptaan Allah. Pandangan Stott ini menegaskan bahwa keadilan sosial bukan hanya isu sekuler, tetapi juga panggilan ilahi bagi Gereja di tengah-tengah dunia yang sedang berjuang melawan ketidaksetaraan. Ketimpangan global mencerminkan ketidakadilan yang sistematis, yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Menurut Joseph Stiglitz, seorang ekonom terkemuka, ketidakadilan global terjadi akibat kebijakan ekonomi internasional yang seringkali menguntungkan segelintir orang kaya dan mengabaikan kesejahteraan mayoritas penduduk dunia (Blake, 2014). Ia mengkritik bagaimana globalisasi, yang seharusnya membawa manfaat bagi semua orang, justru semakin memperburuk kesenjangan ekonomi di banyak negara. Dalam konteks ini, Gereja dapat memainkan peran sebagai suara moral yang memperjuangkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketimpangan ini memiliki dimensi etis yang mendalam. Reinhold Niebuhr, seorang teolog Amerika, menyoroti bahwa dalam masyarakat yang tidak adil, dosa struktural sering kali tersembunyi dalam sistem dan institusi sosial (Hartnett & Ashworth, 2020). Menurut Niebuhr, ketidakadilan tidak hanya terjadi karena tindakan individu, tetapi juga melalui struktur sosial yang mempertahankan ketidaksetaraan. Gereja, dalam hal ini, diharapkan menjadi kritik profetik terhadap sistem yang korup dan bekerja untuk memperbaiki ketidakadilan yang terstruktur. Peran Gereja dalam merespons ketimpangan global mesti didasarkan pada panggilan moral yang melampaui kepentingan politik atau ekonomi semata. Tidak hanya sebagai kritik terhadap ketidakadilan, Gereja juga dipanggil untuk menjadi agen rekonsiliasi dan transformasi. Stanley Hauerwas, seorang teolog kontemporer, menekankan bahwa Gereja bukan hanya lembaga yang bereaksi terhadap masalah sosial, tetapi juga komunitas yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah (Sekisov, 2021). Dalam pandangannya, Gereja memiliki misi untuk membangun

komunitas yang adil dan inklusif, di mana setiap orang diperlakukan dengan martabat dan kasih. Dalam hal ini, Gereja harus aktif dalam mempromosikan keadilan sosial melalui tindakan nyata yang mengubah struktur ketidakadilan.

Respons teologis terhadap ketimpangan global memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik. Teologi kontekstual, seperti yang diajukan oleh Stephen Bevans, menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan politik dalam merumuskan teologi yang relevan (G. S. Whyte, 2023). Gereja perlu menyadari bahwa ketimpangan global bukan hanya masalah universal, tetapi juga memiliki karakteristik lokal yang berbeda-beda. Dengan demikian, pendekatan teologi yang berbasis keadilan sosial mesti disesuaikan dengan konteks lokal di mana ketidakadilan itu terjadi, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal Alkitab tentang keadilan dan kasih. Mengacu dari isu tersebut, kebaruan yang ditawarkan terletak pada eksplorasi tentang bagaimana Gereja dapat memainkan peran strategis dalam merespons ketimpangan global melalui teologi yang berfokus pada keadilan sosial. Pendekatan teologis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, di mana Gereja dipanggil untuk terlibat aktif dalam upaya mengatasi ketidakadilan struktural yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan menggali pandangan para ahli teologi dan tokoh-tokoh agama, riset ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran profetis Gereja dalam mengatasi ketimpangan global, serta mengajak pembaca untuk melihat peran teologi sebagai kekuatan transformatif di dunia yang terus berubah.

METHODS

Paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis *library research* (Connaway & Radford, 2021). Penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk Alkitab, buku, artikel jurnal, dokumen teologis, dan karya-karya akademik terkait. *Library research* dipilih karena pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam teori-teori dan pandangan dari para ahli dalam bidang teologi, keadilan sosial, dan ketimpangan global (Bagenda et al., 2022). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas hubungan antara teologi Kristen dan keadilan sosial, serta peran Gereja dalam merespons ketidakadilan struktural di dunia. Sumber-sumber teologis, seperti karya-karya dari Gustavo Gutiérrez, Reinhold Niebuhr, John Stott, dan Stanley Hauerwas, dianalisis untuk memahami konsep-konsep teologis yang relevan dengan isu ketimpangan global. Selain itu, referensi dari bidang ekonomi dan sosial, seperti tulisan Joseph Stiglitz tentang ketidakadilan ekonomi, juga digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil dari penelitian ini diolah secara deskriptif dan analitis, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana teologi Kristen dapat menjadi landasan bagi Gereja dalam merespons ketimpangan global.

RESULT & DISCUSSION

Teologi Kristen dan Konsep Keadilan Sosial

Teologi Kristen memiliki pijakan yang kuat dalam mengajarkan nilai keadilan sosial, berlandaskan pada konsep dasar tentang keadilan dan kasih yang

ditemukan dalam Alkitab. Dalam Alkitab, keadilan dipandang sebagai atribut Ilahi yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia (Irawati, 2024). Misalnya, dalam Mikha 6:8, umat Tuhan dipanggil untuk “berbuat adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah”. Ajaran ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga suatu perintah Ilahi yang mesti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pengikut Kristus. Kasih terhadap sesama juga menjadi tema sentral dalam Alkitab, khususnya dalam ajaran Yesus. Dalam Matius 22:39, Yesus memerintahkan umat-Nya untuk “mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Kasih terhadap sesama ini bukanlah kasih yang terbatas pada aspek pribadi, melainkan meluas ke tindakan nyata dalam kehidupan sosial (Legi & Keriapy, 2022). Sehingga, setiap bentuk ketidakadilan yang melukai martabat dan hak sesama manusia adalah pelanggaran terhadap perintah ini. Dalam konteks keadilan sosial, kasih menjadi pendorong bagi umat Kristen untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dan miskin.

Alkitab juga menekankan tanggung jawab moral umat beriman untuk membela kaum tertindas. Dalam Amsal 31:8-9, umat diminta untuk “membuka mulut untuk orang bisu, membela hak semua orang yang merana, membela orang yang tertindas dan miskin”. Perintah ini memperjelas bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian integral dari kehidupan iman Kristen. Gereja, sebagai perwujudan tubuh Kristus di dunia, memiliki tugas untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara dan memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat yang mengalami ketimpangan (Pump, 2016). Gustavo Gutiérrez, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami teologi Kristen dari sudut pandang keadilan sosial. Ia berargumen bahwa teologi mesti berpihak pada kaum miskin dan tertindas (McKinney, 2023). Baginya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang tidak adil. Teologi pembebasan, seperti yang diusulkan oleh Gutiérrez, menekankan pentingnya tindakan nyata Gereja dalam mengatasi ketidakadilan dan memperbaiki struktur sosial yang menindas. Gereja tidak boleh berdiam diri, tetapi mesti aktif dalam memerangi ketidakadilan.

Reinhold Niebuhr, menawarkan pendekatan yang lebih realistis terhadap keadilan sosial dalam teologi Kristen. Ia menyoroti bahwa meskipun manusia diciptakan menurut gambar Allah, mereka cenderung egois dan sering kali berbuat dosa, terutama dalam konteks sosial dan politik (Lovin & Mauldin, 2021). Niebuhr berpendapat bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai melalui pengakuan akan keterbatasan moral manusia dan perlunya perubahan struktural yang melibatkan pengawasan ketat terhadap kekuasaan. Pandangan Niebuhr ini menekankan bahwa Gereja mesti bersikap kritis terhadap kekuasaan dan bekerja untuk mengurangi dampak ketidakadilan struktural (Hartnett, 2020). Menanggapi isu antara keadilan sosial dan teologi Kristen, John Stott memberikan perspektif yang berbeda; ia percaya bahwa penginjilan dan pelayanan sosial mesti berjalan beriringan. Bagi Stott, panggilan untuk memberitakan Injil tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan (Meynell, 2022). Gereja sebaiknya terlibat dalam memperbaiki ketidakadilan ekonomi dan sosial, sekaligus membawa pesan kasih dan keselamatan. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan sosial bukanlah sekadar agenda sekuler, melainkan bagian dari misi keselamatan yang lebih luas.

Selain doktrin teologis, penting untuk melihat bagaimana konsep keadilan sosial diterapkan dalam praktik nyata oleh Gereja. Gereja sepanjang sejarahnya telah memiliki peran signifikan dalam membantu mereka yang tertindas dan miskin. Misalnya, melalui pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan advokasi hak asasi manusia, Gereja telah menjadi agen perubahan sosial yang nyata (Jebadu, 2017). Namun, tantangan ketimpangan global saat ini menuntut Gereja untuk memperbaharui komitmennya dalam memperjuangkan keadilan bagi semua orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan. Teologi Kristen menekankan bahwa keadilan sosial tidak hanya sebatas pemberian bantuan karitatif, tetapi juga perlu melibatkan transformasi struktural (Opuni-Frimpong, 2023). Hal ini penting karena ketidakadilan seringkali bersifat sistemik, di mana struktur sosial dan ekonomi secara sadar atau tidak menciptakan ketimpangan. Dalam hal ini, Gereja perlu memainkan peran profetis dengan mengkritisi dan memperjuangkan perubahan dalam sistem yang menindas dan memarginalkan kelompok tertentu.

Lebih jauh, konsep keadilan dalam teologi Kristen tidak hanya menyangkut aspek hukum atau politik, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual. Keadilan tidak bisa dipisahkan dari kasih, di mana tindakan adil mesti dilakukan dengan kasih yang tulus dan berlandaskan pada nilai-nilai Kerajaan Allah (Harefa, 2020). Ini berarti bahwa setiap upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan martabat manusia sebagai gambar Allah, serta menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Dalam konteks globalisasi, keadilan sosial menghadapi tantangan yang lebih kompleks (Waruwu & Lawalata, 2024). Sistem ekonomi global seringkali memperburuk ketimpangan, di mana negara-negara miskin semakin tertinggal dan sumber daya dikendalikan oleh segelintir pihak. Teologi Kristen, melalui prinsip keadilan sosial, memanggil Gereja untuk berdiri bersama kaum miskin dan memperjuangkan distribusi yang lebih adil atas sumber daya. Hal ini mencerminkan esensi dari Kerajaan Allah, di mana semua orang diperlakukan dengan kesetaraan dan martabat.

Gereja juga dipanggil untuk berperan aktif dalam membangun solidaritas global. Dalam dunia yang semakin terhubung, Gereja tidak bisa hanya fokus pada isu-isu lokal, tetapi juga penting terlibat dalam advokasi global untuk mengurangi ketimpangan. Solidaritas ini bukan hanya wujud kasih terhadap sesama manusia, tetapi juga perwujudan dari keadilan yang mendalam, di mana Gereja menolak segala bentuk ketidakadilan dan berjuang demi kesejahteraan bersama. Pentingnya teologi Kristen dalam memperjuangkan keadilan sosial tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada spiritualitas umat (Rusli & Balang, 2023). Dengan terlibat dalam perjuangan melawan ketidakadilan, Gereja membantu umatnya untuk lebih memahami panggilan mereka sebagai pengikut Kristus yang hidup dalam kasih dan keadilan. Melalui pelayanan ini, Gereja tidak hanya menjadi tempat persekutuan spiritual, tetapi juga agen transformasi yang nyata dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan.

Ketimpangan Global dan Dampaknya

Fenomena ketimpangan global merupakan masalah yang terus mengemuka dalam diskursus sosial, ekonomi, dan politik dunia. Ketimpangan ini merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan antar kelompok masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional

(G. S. Whyte, 2023). Pada dasarnya, ketimpangan global mencerminkan adanya kesenjangan yang dalam antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, serta di antara individu-individu di dalam masyarakat. Ketidakadilan ini tidak hanya tampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam dimensi ekonomi, ketimpangan global terlihat jelas dalam disparitas pendapatan dan distribusi kekayaan. Menurut laporan dari lembaga internasional seperti *World Inequality Report*, sebagian besar kekayaan dunia dikuasai oleh segelintir orang kaya, sementara mayoritas populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan (G. S. Whyte, 2023). Konsentrasi kekayaan pada kelompok elit menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diperburuk oleh sistem ekonomi yang cenderung menguntungkan negara-negara kaya dan perusahaan multinasional, yang sering kali mengeksploitasi negara-negara berkembang dan sumber daya alamnya.

Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya merupakan salah satu manifestasi dari fenomena ketimpangan global. Negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti teknologi, energi, dan modal. Dalam banyak kasus, sumber daya alam di negara-negara miskin dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing, yang mengambil keuntungan besar sementara masyarakat lokal tetap terjebak dalam kemiskinan (G. S. Whyte, 2023). Ketidakmampuan negara-negara ini untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri menciptakan ketergantungan yang memperparah ketimpangan global. Dalam dimensi sosial, ketimpangan global menciptakan berbagai bentuk marginalisasi dan diskriminasi (May, 2017). Kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat, minoritas etnis, dan perempuan di banyak negara berkembang, sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses peluang ekonomi dan sosial. Mereka yang berada di pinggiran sosial ini sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan publik, yang lebih menguntungkan kelompok mayoritas atau elit; akibatnya, mereka tetap terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Dampak dari ketimpangan global sangat nyata dalam bentuk kemiskinan yang meluas. Meskipun kemajuan teknologi dan ekonomi global telah membawa banyak manfaat, jutaan orang di seluruh dunia masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan perumahan yang layak sering kali tidak tersedia bagi mereka yang hidup di negara-negara miskin. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana segelintir orang menikmati kemewahan, sementara sebagian besar populasi dunia berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ketimpangan global turut berdampak pada stabilitas politik dan keamanan internasional (Lockwood, 2020). Ketika ketidakadilan ekonomi dan sosial semakin memburuk, ketegangan politik cenderung meningkat. Banyak negara yang mengalami ketidakstabilan politik sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi yang ekstrim, di mana kelompok-kelompok yang merasa tertindas atau terpinggirkan bangkit melawan pemerintahan yang mereka anggap tidak adil. Konflik ini sering kali berujung pada kekerasan dan perang saudara, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut.

Ketimpangan global juga mempengaruhi sistem pendidikan dan kesehatan di banyak negara. Di negara-negara miskin, akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali sangat terbatas, yang pada gilirannya mempersempit peluang untuk meningkatkan taraf hidup (Gedro et al., 2021). Demikian pula, sistem kesehatan di negara-negara ini sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang besar, menyebabkan tingginya angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan di mana generasi baru terus-menerus lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tanggung jawab Gereja dalam menghadapi ketimpangan global sangatlah penting (Olulowo et al., 2022). Gereja dipanggil untuk mengenali dampak ketidakadilan ini dan bekerja aktif dalam mengatasinya. Melalui ajaran Alkitab tentang kasih, keadilan, dan solidaritas, Gereja memiliki peran profetis dalam menentang ketimpangan yang merusak martabat manusia. Gereja dapat terlibat dalam advokasi kebijakan yang adil, mendukung redistribusi sumber daya, dan memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan memperoleh hak-hak dasar mereka.

Selain advokasi, Gereja memiliki peran konkret dalam aksi sosial yang membantu mereka yang terdampak ketimpangan. Banyak Gereja di seluruh dunia telah terlibat dalam pelayanan sosial, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, mendirikan sekolah, dan rumah sakit bagi mereka yang membutuhkan (Benn, 2017). Namun, upaya ini perlu ditingkatkan dan diperluas agar lebih mampu menjangkau mereka yang hidup di pinggiran masyarakat global. Pelayanan ini bukan hanya tindakan karitatif, tetapi juga bagian dari panggilan untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati. Melalui ajaran dan praktiknya, Gereja dapat menjadi katalisator perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong anggotanya untuk lebih terlibat dalam isu-isu sosial, serta mengedukasi mereka tentang dampak ketimpangan global. Gereja juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, membantu memfasilitasi dialog dan kerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih adil.

Peran Profetis Gereja dalam Mengatasi Ketidakadilan

Peran profetis Gereja dalam mengatasi ketidakadilan tidak hanya terbatas pada tugas spiritual, tetapi juga menyentuh tanggung jawab sosial yang mendalam. Dalam konteks dunia yang terpecah oleh ketidakadilan struktural, Gereja diharapkan menjadi suara moral yang berani dalam melawan penindasan dan ketidakadilan. Sebagai lembaga yang berakar pada ajaran Kristus, Gereja memiliki mandat untuk memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan keadilan dan kasih yang setara (Jebadu, 2017). Hal ini sejalan dengan panggilan Alkitab yang sering kali menekankan peran para nabi sebagai pengingat bagi mereka yang berkuasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ketidakadilan struktural yang melingkupi dunia saat ini sering kali bersifat sistemik, berakar pada kebijakan, tradisi, dan pola pikir yang mendiskriminasi kelompok tertentu. Dalam menghadapi realitas ini, Gereja tidak dapat berdiam diri. Ajaran Alkitab, terutama dalam kitab-kitab para nabi, jelas menunjukkan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk mengangkat suara mereka demi orang miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Dalam perannya sebagai agen perubahan sosial, Gereja bertanggung jawab untuk melawan sistem yang

menyebabkan ketidakadilan tersebut, melalui advokasi, pendidikan, dan pelayanan langsung kepada mereka yang terdampak.

Salah satu contoh nyata dari peran profetis ini adalah keterlibatan Gereja dalam perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Para pemimpin Gereja, seperti Desmond Tutu, menggunakan platform mereka untuk menantang ketidakadilan rasial yang dilegitimasi oleh negara (Macqueen, 2017). Dengan berani melawan sistem yang tidak adil, mereka tidak hanya menunjukkan komitmen kepada nilai-nilai kristiani, tetapi juga menginspirasi gerakan global untuk mendukung hak asasi manusia. Gereja, dalam hal ini, menjadi juru bicara bagi mereka yang tidak memiliki suara dalam struktur kekuasaan yang menindas. Lebih jauh, peran profetis Gereja juga terwujud dalam upayanya membongkar ketidakadilan ekonomi. Gereja tidak hanya dipanggil untuk memberikan bantuan karitatif, tetapi juga untuk mengadvokasi perubahan struktural yang lebih adil dalam sistem ekonomi global (Bolung, 2023). Sebagaimana diajarkan oleh teolog seperti Gustavo Gutiérrez dalam teologi pembebasan, Gereja dipanggil untuk berada di sisi kaum miskin dan tertindas. Keadilan sosial bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memperjuangkan sistem yang memastikan redistribusi kekayaan yang adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang.

Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan gender dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin mereka (Tangirerung et al., 2023). Dalam banyak masyarakat, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban dari ketidakadilan struktural yang mengakar dalam budaya dan tradisi. Gereja, yang dipanggil untuk menjadi agen kasih Kristus, perlu memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi, baik dalam struktur gereja itu sendiri maupun di dalam masyarakat yang lebih luas. Gereja dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Selain itu, Gereja mesti berani menantang ketidakadilan politik yang sering kali mengorbankan masyarakat sipil demi kepentingan segelintir elit (Zega & Silaen, 2024). Seperti yang dilakukan oleh Reinhold Niebuhr melalui teologinya yang menekankan tanggung jawab moral dalam politik, Gereja mesti berani mengkritik sistem kekuasaan yang korup dan menindas. Tugas Gereja bukan hanya mematuhi otoritas politik, tetapi juga menjadi pengawas moral yang mengingatkan pemerintah tentang tugas mereka untuk melayani rakyat dengan adil dan transparan. Gereja harus menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar dalam proses politik.

Peran profetis Gereja juga mencakup tanggung jawab untuk membela hak-hak lingkungan dan menciptakan keadilan ekologis. Ketidakadilan tidak hanya terjadi di antara manusia, tetapi juga melibatkan perlakuan terhadap alam (Whyte, 2016). Gereja dipanggil untuk membela ciptaan Tuhan dari eksploitasi yang merugikan generasi masa depan. Dalam ensiklik *Laudato Si'*, Paus Fransiskus menekankan pentingnya peran Gereja dalam menjaga bumi dan memperjuangkan keadilan ekologis (Massaro, 2023). Gereja memiliki mandat moral untuk berbicara menentang kebijakan atau praktik yang merusak lingkungan dan mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Dalam banyak kasus, ketidakadilan struktural juga diperparah oleh kurangnya akses terhadap pendidikan. Gereja dapat berperan penting dalam memfasilitasi pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan, membantu mereka

mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk keluar dari siklus kemiskinan. Selain menyediakan akses pendidikan, Gereja perlu mengajarkan nilai-nilai keadilan, kasih, dan solidaritas dalam kurikulumnya, sehingga generasi mendatang dapat dibesarkan dengan kesadaran yang kuat akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial.

Tanggung jawab moral Gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial melibatkan aksi nyata melalui pelayanan kasih (Rusli & Balang, 2023). Gereja perlu bergerak melampaui kata-kata dan memastikan bahwa ajaran kasih Kristus diterjemahkan dalam tindakan. Ini dapat mencakup membentuk jaringan bantuan sosial yang tangguh, mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan pusat pendidikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, Gereja menunjukkan bahwa mereka benar-benar berdiri bersama yang lemah dan tertindas, membawa harapan dan solusi praktis bagi mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa Gereja juga memiliki tantangan internal dalam menjalankan peran profetis ini. Di satu sisi, Gereja perlu merefleksikan dan mengatasi setiap bentuk ketidakadilan di dalam strukturnya sendiri. Dalam hal ini, Gereja mesti menjadi contoh nyata dari keadilan dan kesetaraan, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang otentik bagi masyarakat luas (Wahyuni, 2021); Gereja yang adil di dalam dirinya akan lebih efektif dalam memperjuangkan keadilan di luar dirinya.

Dalam konteks globalisasi, Gereja juga menghadapi tantangan dalam menavigasi hubungan antara budaya lokal dan pengaruh internasional. Ketidakadilan global sering kali terjadi sebagai hasil dari ketimpangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Gereja mesti mampu memberikan respon yang relevan dan kontekstual terhadap ketidakadilan ini, memahami bahwa perjuangan keadilan di berbagai belahan dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada prinsipnya, peran profetis Gereja dalam mengatasi ketidakadilan struktural sebaiknya tidak berhenti pada retorika moral, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan (Salurante et al., 2021), membongkar struktur-struktur yang tidak adil dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan berpijak pada ajaran kasih Kristus, Gereja memiliki potensi besar untuk menjadi agen transformasi di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Melalui aksi nyata, advokasi, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, Gereja dapat menjalankan panggilan profetisnya untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati.

CONCLUSION

Teologi Kristen menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu substansi dari panggilan Gereja untuk merespons ketimpangan global. Dengan dasar Alkitab, Gereja dipanggil untuk mengasihi sesama, memperjuangkan keadilan bagi kaum tertindas, dan menantang struktur yang tidak adil. Pandangan teologis dari tokoh-tokoh seperti Gustavo Gutiérrez, Reinhold Niebuhr, dan John Stott menunjukkan bahwa Gereja memiliki peran profetis dalam menciptakan perubahan sosial, baik melalui advokasi kebijakan yang adil maupun tindakan nyata dalam membantu mereka yang terpinggirkan. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya merupakan konsep teologis, tetapi juga tanggung jawab moral yang penting diwujudkan dalam setiap dimensi pelayanan kristiani. Gereja, dalam kapasitasnya

sebagai agen transformasi, dipanggil untuk bekerja secara aktif dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik yang membatasi akses individu terhadap kesempatan yang setara. Gereja sebaiknya tidak berdiam diri dalam menghadapi ketidakadilan struktural, melainkan mesti menjadi suara yang memperjuangkan hak-hak mereka yang dirugikan. Dengan mengikuti ajaran kasih Kristus dan menyuarakan keadilan, Gereja dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan global, membawa harapan, dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

REFERENCES

- Bagenda, E. C., & et al. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (library research)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Benn, C. (2017). Guest introduction: faith and health in development contexts. *DEVELOPMENT IN PRACTICE*, 27(5), 575–579.
- Blake, J. (2014). Feminist Critique of Joseph Stiglitz's Approach to the Problems of Global Capitalism. *Stance*, 7, 89–96.
- Bolung, B. J. (2023). Misi Gereja dalam Menghadapi Tantangan Global dan Lokal. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 193–201.
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research Methods in Library and Information Science*. BLOOMSBURY.
- Dimitriadis, V. D. (2019). Gustavo Gutiérrez: Liberation Theology for a World of Social Justice and Just Peace. *Journal of Ecumenical Studies*, 54, 431–441.
- Gedro, D. M., Hartman, D. B., & Suárez, L. (2021). Impact of Poverty on Quality of Education in Haiti. *Journal of Education*, 4(7), 1–9.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN*, 13(1), 39–47.
- Hartnett, L. (2020). The Impossible Possibility of Love': Reinhold Niebuhr's thought on racial justice. *Journal of International Political Theory*, 17(2), 151–168.
- Hartnett, L., & Ashworth, L. (2020). Introduction: Why read Reinhold Niebuhr now? *Journal of International Political Theory*, 17(2), 118–122.
- Irawati, C. W. (2024). Sumbangsi Teologi Abraham Kuyper bagi Keadilan Sosial di Indonesia. *Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 5(1), 50–66.
- Jebadu, A. (2017). Dimensi Politik dari Misi Pembebasan Gereja bagi Orang Miskin dan Pemeliharaan Alam Ciptaan. *Jurnal Teologi*, 6(2), 167–186.
- Legi, H., & Keriapy, F. (2022). Pendidikan Agama Kristen sebagai Sebuah Usaha Menumbuhkan Sikap Toleransi. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 4(2), 187–198.
- Lockwood, E. (2020). The international political economy of global inequality. *Review of International Political Economy*, 28(2), 421–445.
- Lovin, R., & Mauldin, J. (Eds.). (2021). *The Oxford Handbook of Reinhold Niebuhr*. Oxford Academic.
- Macqueen, I. (2017). Ecumenism and the global anti-apartheid struggle: The World Council of Churches' Special Fund in South Africa and Botswana, 1970-75. *Historia*, 62, 87–111.
- Massaro, T. J. (2023). What Precisely Did Pope Francis Contribute? Parsing Key Terms and Claims in *Laudato Si'*. *Social Sciences*, 12(10), 1–12.
- May, P. (2017). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. *Review of Political Economy*, 29(2), 336–338.
- McKinney, S. (2023). Catholic education and social justice in Europe. *International Studies*

- in Catholic Education*, 15(1), 77–89.
- Meynell, M. (2022). Global Anglican, Global Evangelical: The Paths That Led to Stott's Lasting Influence. *Unio Cum Christo*, 8(2), 31–48.
- Olulowo, O. A., Adedokun, T. O., & Fawole, O. O. (2022). Information Dissemination and Poverty Alleviation for Sustainable Development: Role of the Church. *Journal of Information and Knowledge Management*, 13(2), 47–63.
- Opuni-Frimpong, K. (2023). An Examination of the Role of Public Theology in the Church's Efforts Toward National Transformation in Ghana. *E-Journal of Religious and Theological Studies*, 9(6), 238–252.
- Pump, A. (2016). *The Church in Globalization: A World-Systems Analysis on the Influence of Liberalism in Modern Catholic Social Thought*. University of Ottawa.
- Rusli, & Balang, N. (2023). Panggilan Gereja dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial bagi Kelompok Marginal: Sebuah Tantangan Etis-Teologis. *Jurnal Teruna Bhakti*, 5(2), 363–371.
- Salurante, T., Bilo, D. T., & Kristanto, D. (2021). Transformasi komunitas misi: Gereja sebagai ciptaan baru dalam Roh Kudus. *KURIOS*, 7(1), 136–146.
- Sekisov, V. (2021). The Political Nature of the Church According To Stanley Martin Hauerwas, William T. Cavanaugh and Walter Brueggemann. *Skhid*, 1(3), 40–44.
- Tangirerung, J. R., Wangania, J. D. L., & Tapparan, M. R. (2023). Meneroka Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Gereja dan Masyarakat Toraja. *KURIOS*, 10(1), 320–333.
- Wahyuni, S. (2021). Pemimpin Gereja Visioner Pelaku Perubahan. *JUTEOLOG*, 1(2), 187–200.
- Waruwu, E. W., & Lawalata, M. (2024). Membangun Masyarakat Digital yang Beretika: Mengintegrasikan Nilai-nilai Kristen di Era Teknologi Digital 5.0. *Jurnal Didaché*, 5(1), 22–46.
- Whyte, G. S. (2023). Bevans Revisited: Reflections on Stephen Bevans's Models of Contextual Theology. *International Bulletin of Mission Research*, 47(3), 430–440.
- Whyte, K. (2016). Indigenous Experience, Environmental Justice and Settler Colonialism. Available at SSRN, 1–17.
- Zega, Y. A., & Silaen, R. T. (2024). Pembimbingan Jemaat di GKSI Isa Almasih Taman Mini dalam Menolak Politik Uang. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 70–85.